

STRUKTUR Kepemilikan & Kebijakan **HUTANG**

(Strategi Perusahaan dalam Mengelola Struktur
Kepemilikan dan Kebijakan Hutang Untuk
Mencapai Tujuan Bisnis)



DR. RUSTAN. SE., M.Si., AK., CA., CPA., ASEAN CPA

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN HUTANG

**(Strategi Perusahaan dalam
Mengelola Struktur Kepemilikan
dan Kebijakan Hutang Untuk
Mencapai Tujuan Bisnis)**

Dr. Rustan. SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA



PENERBIT AGMA

**Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan (Strategi Perusahaan dalam
Mengelola Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang Untuk
Mencapai Tujuan Bisnis).**

Penulis:

Dr.Rustan. SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

Editor:

Dr.Rustan. SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

ISBN:

Desainer:

Asmayani

Sumber Gambar Cover:

canva.com

Penata Letak:

Agusalim Juhari

Ukuran:

xii, 58 hlm., 15,5 cm x23cm

Diterbitkan oleh:

Penerbit AGMA



Redaksi:

Jl. Dirgantara, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga,
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. 92161
Telp: (0411) 8201421, HP/WA: 081355428007
Email: agma.myteam@gmail.com
Website: www.penerbitagma.com



Cetakan Pertama

Hak Cipta 2023, pada **Dr.Rustan. SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku initanpa
izin tertulis dari Penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PRAKATA.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. STRUKTUR KEPEMILIKAN	9
A. Teori Struktur Kepemilikan	9
B. Konsep Dasar Struktur Kepemilikan	10
C. Kepemilikan Manajerial	11
D. Kepemilikan Institutional.....	14
BAB 3. KEBIJAKAN HUTANG	17
A. Teori Kebijakan Hutang.....	17
B. Konsep Dasar Kebijakan Hutang.....	19
C. pengukuran Kebijakan Hutang.....	22
D. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan.....	23
BAB 4 KAIDAH DAN PENGUKURAN RISET	25
BAB 5 KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	29
A. Deskripsi Data	29
B. Analisis Regresi Pada Persamaan Y	30
C. Struktur Kepemilikan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang.....	30
D. Keputusan Mengelola Modal Sendiri atau Hutang	32
BAB 6. STRATEGI MENGELOLA STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN HUTANG	35
A. Strategi Mengelola Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen Perusahaan	35
B. Manfaat Struktur Kepemilikan dalam Mencapai Tujuan Bisnis.....	45
BAB 7 HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG UNTUK MENCAPAI TUJUAN BISNIS.....	49

DAFTAR PUSTAKA..... 53
BIOGRAFI PENULIS..... 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Statistik Data Perusahaan di BEI Tahun 2010-2017	29
Tabel 2. Hasil Estimasi Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kepemilikan Manajerial.....	11
Gambar 2. Kepemilikan Institutional.....	14

PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat, pertolongan, karunian, dan petunjukNya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan buku ini dengan judul: Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang. Buku ini membahas tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Di dalam buku ini, pembaca akan mempelajari berbagai teori dan konsep terkait struktur kepemilikan dan kebijakan hutang, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola keduanya

Buku ini dirancang untuk membantu para profesional bisnis, akademisi, mahasiswa, dan pembaca lainnya yang ingin memahami lebih dalam mengenai struktur kepemilikan dan kebijakan hutang, dan bagaimana keduanya dapat diterapkan dalam konteks bisnis modern yang kompleks dan dinamis.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur kepemilikan dan kebijakan hutang, dan memberikan wawasan yang berguna bagi para pembaca untuk mengelola perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Kami juga berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan studi bisnis dan manajemen di Indonesia

Makassar, Januari 2023

Penulis

RUSTAN.

BAB 1

PENDAHULUAN

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemilik modal atau pemegang saham, yang kemudian dapat dinikmati dalam bentuk dividen atau kenaikan nilai saham. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mempercayakan manajer untuk mengelola operasional perusahaan dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Manajer bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang. Perusahaan menerapkan fungsi manajemen adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian, penyusunan staf dan pengambilan keputusan dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. Peran manajer adalah untuk mendapatkan sumber dana dan bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara efektif, sehingga tercapailah tujuan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemilik modal. Sumber dana dalam hal ini menjadi peranan penting agar tujuan tersebut berhasil.

Sumber dana perusahaan bisa berasal dari dana internal seperti laba ditahan dan dana aliran kas, sedangkan dana eksternal berupa hutang dan penerbitan saham baru. Perusahaan tidak akan berkembang apabila sumber dananya hanya berasal dari dana internal saja karena perusahaan bisa juga melakukan ekspansi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan penambahan dana dari pihak eksternal perusahaan, diantaranya adalah dengan hutang atau melalui penerbitan saham baru. Tetapi, para manajer harus berhati-hati dalam memutuskan sumber dana mana yang akan digunakan. Pemilihan sumber dana yang tepat dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dalam menjalankan tugasnya, manajer harus mempertimbangkan berbagai

faktor seperti kebijakan hutang, struktur kepemilikan, risiko, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat dalam mengelola sumber daya perusahaan, termasuk pengelolaan hutang dan modal.

Manajer juga harus mempertimbangkan kondisi pasar dan persyaratan pembiayaan saat memilih sumber dana. Misalnya, pada saat pasar saham sedang lesu, mungkin tidak tepat untuk mengeluarkan saham baru, sementara pada saat yang sama, pasar obligasi dapat menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk meminjam.

Ketika memilih sumber dana, manajer perlu memperhitungkan tujuan jangka panjang perusahaan, risiko keuangan, biaya modal, kondisi pasar, dan persyaratan pembiayaan. Dalam hal ini, manajer harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sumber dana yang dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan pemegang sahamnya

Perusahaan membuat kebijakan hutang manajerial cenderung menggunakan hutang yang tinggi bukan atas dasar maksimalisasi nilai perusahaan, melainkan untuk kepentingan opportunistik mereka, seperti dengan pemilihan proyek-proyek yang memiliki risiko yang besar dengan pendanaan yang besar pula. Hal ini menyebabkan meningkatnya beban bunga perusahaan sehingga risiko kebangkrutan semakin tinggi yang berdampak pada biaya agensi hutang semakin tinggi. Peningkatan biaya keagenan tersebut akan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan. Konflik keagenan dapat diminimalkan dengan memberikan persentase kepemilikan saham ke pihak manajerial.

Pada perusahaan yang telah go public kebijakan hutang memiliki peranan penting di dalamnya yaitu sebagai solusi dari konflik keagenan. Konflik keagenan adalah konflik antara pihak manajerial perusahaan dengan pihak pemegang saham yang disebabkan karena adanya suatu perbedaan kepentingan yang salah

satunya disebabkan oleh aliran kas bebas (free cash flow) (Jensen dan Meckling, 1976). Kebijakan hutang mampu dijadikan sebagai solusi dari konflik keagenan karena kebijakan hutang mampu mengimbangi agency cost yang ditimbulkan dari konflik keagenan. Aliran kas bebas (free cash flow) adalah keuntungan bersih operasional perusahaan, setelah diperhitungkan investasi modal kerja dan aktiva tetap selama periode berjalan. Free cash flow adalah hak pemegang saham sehingga investor akan menuntut pembagian free cash flow yang ada pada perusahaan sedangkan manajer berpandangan untuk menggunakan free cash flow melalui reinvestasi yang dapat menguntungkan mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Tekanan pemegang saham untuk dapat memperoleh kas bebas, mengharuskan manajer untuk dapat memperoleh sumber pendanaan dari pihak ketiga yaitu debtholders. Dengan adanya hutang, manajer akan termotivasi untuk bekerja lebih efisien guna meningkatkan efisiensi perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan sehingga hutang memiliki peranan sebagai monitoring tindakan manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang adalah kepemilikan institutional yang merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Adanya kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Tindakan monitoring tersebut akan mengurangi biaya keagenan karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan kebangkrutan perusahaan (Crutchley, 1999). Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh kepemilikan institutional akan menyebabkan monitoring menjadi semakin efektif, melalui pengendalian perilaku opportunistic para manajer (Wahidahwati, 2001).

Struktur kepemilikan dan kebijakan hutang merupakan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Struktur kepemilikan mengacu pada siapa yang

memiliki saham perusahaan dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan manajemen, sementara kebijakan hutang berkaitan dengan bagaimana perusahaan membiayai operasi dan investasi mereka dengan menggunakan utang.

Penting untuk memahami hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan hutang, karena struktur kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih sumber pendanaan, termasuk dalam hal menggunakan utang. Misalnya, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau individu mungkin lebih cenderung menggunakan pendanaan internal atau ekuitas daripada utang, karena mereka tidak ingin mengambil risiko yang terlalu besar dengan meminjam uang dari pihak luar.

Di sisi lain, perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional mungkin lebih cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, karena mereka dapat memanfaatkan leverage untuk meningkatkan pengembalian investasi mereka. Namun, penggunaan terlalu banyak utang dapat menyebabkan risiko keuangan yang besar bagi perusahaan, terutama jika pengembalian investasi tidak memenuhi harapan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan hutang, dan mengelola keduanya secara bijaksana untuk mencapai tujuan bisnis yang optimal.

Strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang menjadi penting karena keduanya merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Struktur kepemilikan mengacu pada siapa yang memiliki saham perusahaan dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan manajemen. Sementara itu, kebijakan hutang berkaitan dengan bagaimana perusahaan membiayai operasi dan investasi mereka dengan menggunakan utang.

Perusahaan yang berhasil mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang secara efektif dapat mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan kebijakan hutang untuk membiayai ekspansi dan

investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan risiko keuangan yang mungkin timbul dari penggunaan utang ini.

Selain itu, struktur kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dan strategi bisnis yang diambil oleh perusahaan. Jika sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh investor institusional, manajemen perusahaan mungkin akan lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, jika mayoritas saham dimiliki oleh individu atau keluarga, manajemen perusahaan mungkin lebih cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan finansial pemilik.

Dalam rangka mencapai tujuan bisnis, perusahaan harus mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang mereka secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat

Adapun penulis membahas mengenai struktur kepemilikan dan kebijakan hutang dengan terdorong karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahidawati (2002) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan. Sebuah Perspektif teori Keagenan”, Larasati (2011) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang”, Putri dan Nasir (2006) dengan judul “Analisis Persamaan Simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang Dan Kebijakan Dividen Dalam Perspektif Teori Keagenan”, Masdupi (2005) dengan judul “Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan”. Yenieatie dan Nicken (2010) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di BEI”. Serta Indahningrum dan Ratih (2009) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dividen, Pertumbuhan perusahaan, *Free Cash Flow*, dan

Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan“

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diajukan rumusan masalah yaitu 1), Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan hutang?. 2). Bagaimana strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang dalam mencapai tujuan bisnis?

Adapun tujuan adalah Untuk mengetahui struktur kepemilikan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang, serta untuk mengetahui strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk mencapai tujuan bisnis.

Kajian teori mengenai kebijakan dividen dan nilai perusahaan memiliki beberapa manfaat yang penting, antara lain;

Manfaat teoritis dan praktis dari kajian struktur kepemilikan terhadap kebijakan hutang adalah sebagai berikut

1) Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, kajian struktur kepemilikan terhadap kebijakan hutang dapat membantu memahami hubungan antara sumber dana dan struktur modal. Beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh antara lain

- Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kebijakan hutang perusahaan, seperti risiko, keuntungan, dan struktur kepemilikan
- Menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan
- Menjelaskan bagaimana kebijakan hutang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
- Meningkatkan pemahaman teoritis tentang manfaat dan biaya dari berbagai sumber dana, seperti saham, hutang, atau modal ventura

2) Manfaat praktis

Dari segi praktis, kajian struktur kepemilikan terhadap kebijakan hutang dapat membantu manajer dan pengambil keputusan keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai sumber dana dan struktur modal. Beberapa manfaat praktis yang

dapat diperoleh antara lain;

- Memilih sumber dana yang tepat untuk membiayai kegiatan perusahaan
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber dana dan struktur modal.
- Mengoptimalkan struktur modal sehingga meminimalkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan.
- Meningkatkan keterbukaan dan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan.
- Menghindari risiko keuangan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan.

BAB 2

STRUKTUR KEPEMILIKAN

A. Teori Struktur Kepemilikan

Teori struktur kepemilikan adalah teori yang mempelajari hubungan antara kepemilikan perusahaan dengan kinerja perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa kepemilikan dapat mempengaruhi perilaku manajemen dan hasil kinerja perusahaan. Ada beberapa pendekatan yang berbeda dalam teori struktur kepemilikan, termasuk

1. Pendekatan agensi: Pendekatan ini mengasumsikan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Pemilik ingin memaksimalkan nilai perusahaan sedangkan manajemen memiliki kepentingan pribadi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kepemilikan publik (saham yang diperdagangkan di pasar saham) cenderung mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan pengawasan atas manajemen
2. Pendekatan hak suara: Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pemegang saham yang memiliki hak suara yang lebih besar akan memiliki kontrol yang lebih besar atas manajemen perusahaan dan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan secara signifikan.
3. Pendekatan pasar: Pendekatan ini mengasumsikan bahwa struktur kepemilikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan kinerja perusahaan karena investor memperhitungkan risiko yang terkait dengan kepemilikan dalam menilai harga saham.
4. Pendekatan kelompok kepentingan: Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kepemilikan tidak hanya terkonsentrasi pada pemegang saham, tetapi juga pada kelompok kepentingan

lainnya seperti kreditur, pekerja, dan pemerintah. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kepemilikan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan perilaku manajemen

Secara keseluruhan, teori struktur kepemilikan membantu memahami hubungan antara kepemilikan perusahaan dan kinerja perusahaan. Teori ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan struktur kepemilikan yang optimal untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen

B. Konsep Dasar Struktur Kepemilikan

Menurut Sudana (2011) mengatakan bahwa struktur kepemilikan adalah pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang menginvestasikan modalnya kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengambil keputusan dalam perusahaan

Struktur kepemilikan menjelaskan proporsi kepemilikan saham yang terdapat pada sebuah perusahaan, serta bagaimana tindakan yang dilakukan pemilik saham tersebut (Petta & Tarigan, 2017). **Struktur Kepemilikan** merupakan kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Struktur kepemilikan ini merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, publik ataupun institusional. Di dalam penelitian ini digunakan kepemilikan manajerial dan institusional. Masalah yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan ini adalah *agency conflict*, dimana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai pengambil *decision maker* dan para pemegang saham sebagai *owner* dari perusahaan. Tentunya perbedaan kepentingan ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jumlah pemegang saham besar (*large shareholders*) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997).

Menurut Untung dan Hartini (2006), struktur kepemilikan

dikelompokkan atas proporsi saham yang dimiliki yaitu:

- **Kepemilikan manajerial (*Managerial ownership*)**
Merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).
- **Kepemilikan institusional (*Institutional ownership*)**
Merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas laporan yang dibuat menurut data di *Jakarta Stock Exchange* serta kepemilikan saham oleh pihak *blockholders* yaitu saham yang dimiliki perseorangan diatas 5% selama tiga tahun berturut-turut tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider.

C. Kepemilikan Manajerial



Gambar 1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mencerminkan saham yang menjadi milik manajemen baik itu komisaris maupun direksi, yang digambarkan

oleh banyaknya saham manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manakala terjadi kesalahan dalam penentuan keputusan, manajemen secara sadar maupun tidak akan ikut terdampak karena sahasahamnya ditanamkan dalam perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Agar dapat mengendalikan perusahaan dengan leluasa, manajemen harus memiliki saham yang mayoritas ada. Karena jika demikian, kedudukan manajemen menjadi pemilik saham secara bersamaan, dan dapat secara selaras berusaha memperoleh kesejahteraan bagi pemilik (Wijaya & Saebani, 2019).

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen baik sebagai direktur maupun sebagai dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan manajerial berbeda dengan perusahaan yang tanpa kepemilikan manajerial. Perbedaannya terletak pada kualitas pengambilan keputusan oleh manajer serta aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial didalamnya membuat manajer sekaligus bertindak sebagai pemegang saham. Hal ini tentu akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dan juga memberikan konsekuensi, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi dirinya, maka dari itu manajer tidak mungkin bertindak secara gegabah dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Penelitian Wahidahwati (2002) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan hutang.

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder, 2010:84). Agent diberi mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan. Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham

D. Kepemilikan Institutional



Gambar 2. Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan suatu perusahaan yang sahamnya milik berbagai bentuk lembaga ataupun perusahaan lainnya, baik itu didalam maupun luar negeri (Singal & Putra, 2019). Kepemilikan institusional difungsikan sebagai penjamin manajemen perusahaan memberikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemegang saham lebih diuntungkan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Pengukurannya dengan cara jumlah saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Wahidahwati (2002) menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional dapat mengurangi hutang perusahaan dalam rangka meminimalkan total biaya keagenan hutang (*agency cost of debt*).

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional (Wida, 2015). Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2016).

BAB 3

KEBIJAKAN HUTANG

A. Teori Kebijakan Hutang

Teori kebijakan hutang mengacu pada cara perusahaan atau pemerintah menggunakan hutang untuk membiayai kegiatan dan proyek mereka. Teori ini mencakup beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola hutang, termasuk penggunaan hutang untuk memperluas operasi bisnis, meningkatkan investasi, atau untuk mengatasi krisis keuangan.

Salah satu teori kebijakan hutang yang paling umum adalah teori struktur modal, yang berfokus pada bagaimana perusahaan harus memilih antara menggunakan hutang atau ekuitas untuk membiayai kegiatan mereka. Menurut teori struktur modal, perusahaan harus mencari keseimbangan optimal antara hutang dan ekuitas agar dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Teori ini mengasumsikan bahwa ada biaya dan manfaat yang terkait dengan penggunaan hutang dan ekuitas, dan perusahaan harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut sebelum membuat keputusan.

Teori kebijakan hutang juga mencakup pendekatan yang berbeda untuk mengelola risiko yang terkait dengan hutang. Salah satu teori ini adalah teori opsi real, yang mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dalam memilih opsi yang berbeda ketika menghadapi kondisi pasar yang tidak pasti. Teori ini memandang hutang sebagai pilihan yang memberikan perusahaan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang menguntungkan dan menghindari risiko yang terkait dengan keputusan investasi.

Secara keseluruhan, teori kebijakan hutang penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk memilih keputusan hutang yang

tepat dan meminimalkan risiko finansial. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan penggunaan hutang, termasuk biaya dan manfaatnya, untuk membuat keputusan yang tepat.

Untuk membuat keputusan hutang yang tepat, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, seperti

1. Kemampuan membayar:

Perusahaan harus mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar hutang yang diperoleh. Kondisi keuangan perusahaan, penghasilan, arus kas, dan laba perusahaan harus diperhitungkan sebelum memutuskan jumlah dan jangka waktu hutang yang akan diambil

2. Biaya modal:

Perusahaan harus mempertimbangkan biaya modal (biaya pinjaman) dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Jika tingkat pengembalian lebih tinggi dari biaya modal, maka penggunaan hutang dapat menghasilkan keuntungan.

3. Risiko:

Setiap penggunaan hutang memiliki risiko tertentu, seperti risiko kreditur, risiko bunga, dan risiko likuiditas. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko-risiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya

4. Struktur modal:

Perusahaan harus mempertimbangkan struktur modal mereka dan mencari cara untuk mengoptimalkan struktur modal dengan memilih kombinasi yang tepat antara modal sendiri dan hutang.

5. Kebijakan perusahaan:

Kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa penggunaan hutang sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan bisnis

6. Kondisi pasar:

Perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar, termasuk suku bunga, kondisi ekonomi, dan persyaratan perbankan saat

memutuskan penggunaan hutang.

7. Tujuan penggunaan dana:

Tujuan penggunaan dana harus diperhatikan dalam memutuskan penggunaan hutang. Apakah hutang digunakan untuk ekspansi bisnis atau untuk keperluan jangka pendek seperti pembelian persediaan atau pembayaran gaji karyawan

Dalam membuat keputusan hutang, perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor di atas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan.

B. Konsep Kebijakan Hutang

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur (Munawir, 2014). Hutang merupakan modal yang berasal dari pinjaman bank, lembaga keuangan, maupun dengan cara menerbitkan surat hutang (obligasi), dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap perusahaan (Sutrisno, 2009)

Keputusan pembiayaan perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Terdapat pilihan sumber pendanaan antara lain modal internal dan modal eksternal. Modal Internal merupakan modal yang berasal dari laba ditahan dan modal eksternal berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Sedangkan modal yang berasal dari kreditur disebut sebagai hutang perusahaan (Riyanto, 2001). Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi yang kemungkinan besar akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari keharusan badan usaha tertentu pada saat ini untuk mentransfer aktiva dan memberikan pelayanan kepada badan usaha lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa masa lalu (Dewi, 2008).

Kebijakan hutang adalah keputusan manajemen tentang bagaimana perusahaan akan membiayai operasinya dan memutuskan berapa banyak utang yang akan digunakan dalam pembiayaan tersebut. Kebijakan hutang mencakup pemilihan jenis dan sumber utang yang akan digunakan, jumlah utang yang akan diambil, jangka waktu pengembalian, dan biaya modal yang diperlukan untuk membayar utang

Kebijakan hutang perusahaan sangat penting karena dapat berdampak pada nilai perusahaan dan risiko yang dihadapi. Perusahaan yang memiliki kebijakan hutang yang seimbang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memperbesar pengembalian atas modal pemegang saham. Di sisi lain, perusahaan yang terlalu banyak menggunakan hutang dapat menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih besar karena hutang tersebut harus dibayar kembali dengan bunga

Selain itu, kebijakan hutang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profil risiko perusahaan, tingkat bunga, kondisi pasar keuangan, tingkat pertumbuhan industri, dan kebijakan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam menentukan kebijakan hutang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategi bisnis jangka panjang mereka

Kebijakan hutang yang ditetapkan dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari struktur hutang. Struktur hutang menjelaskan mengenai komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Menurut jangka waktunya hutang dibedakan menjadi dua, yaitu :

■ **Hutang Jangka Pendek**

Hutang jangka pendek adalah hutang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutang jangka pendek yang baru. Siklus operasi adalah periode waktu yang diperlukan antara akuisisi barang dan jasa

yang terlibat dalam proses manufaktur serta realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penghasilan selanjutnya. Hutang jangka pendek meliputi :

- 1) Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan.
- 2) Hutang wesel, adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah hutang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya.
- 3) Biaya yang masih harus dibayar (*accrued expense*), adalah hutang yang timbul karena perusahaan telah memanfaatkan atau merasakan suatu jasa atau fasilitas tertentu tetapi belum dilakukan pembayaran.
- 4) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian atau seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek karena harus segera dilakukan pembayaran.
- 5) Pendapatan diterima di muka (*deferred revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang dan jasa yang belum terealisasi.

■ Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Hutang jangka panjang terdiri dari :

- 1) Hutang hipotek (*mortgage payable*), adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk menutuptagihannya.
- 2) Hutang obligasi (*bond payable*), adalah surat pengakuan hutang dengan bunga jangka panjang yang akan dibayarkan pada tanggal tertentu.

Beberapa jenis kebijakan hutang yang dapat diambil oleh perusahaan antara lain:

1) Kebijakan hutang yang konservatif:

Dalam kebijakan ini, perusahaan menggunakan sedikit hutang untuk membiayai operasionalnya dan lebih mengandalkan modal sendiri. Kebijakan ini mengurangi risiko kebangkrutan, tetapi juga membatasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar

2) Kebijakan hutang yang agresif:

Dalam kebijakan ini, perusahaan menggunakan lebih banyak hutang untuk membiayai operasionalnya. Kebijakan ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatkan risiko kebangkrutan

3) Kebijakan hutang yang moderat:

Dalam kebijakan ini, perusahaan menggunakan jumlah hutang yang moderat untuk membiayai operasionalnya. Kebijakan ini merupakan keseimbangan antara risiko kebangkrutan dan keuntungan perusahaan

C. Pengukuran Kebijakan Hutang

Menurut Kasmir (2016:158) pengukuran yang mempengaruhi kebijakan hutang dapat dilakukan dengan menggunakan: “Debt To Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan”. Sedangkan menurut Hery (2015:167) adalah sebagai berikut: “Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas”. Debt To Equity Ratio atau yang umum disingkat dengan DER, merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang yang ada dengan menggunakan modal/ekuitas yang ada, nilai DER umumnya maksimal adalah 150% dan untuk perusahaan multifinance adalah 600%. DER

yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki peningkatan untung yang maksimal, maka perusahaan harus menghasilkan perhitungan DER yang optimum sebagai analisis fundamental penanaman saham di perusahaan (Hery, 2015:167).

Adapun rumus Debt To Equity Ratio (DER) menurut Kasmir (2016:158), yaitu sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Keterangan :

- Total Hutang = Penjumlahan seluruh hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang
- Total Ekuitas = Total hak pemilik aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi dengan kewajiban)

D. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang meliputi sebagai berikut:

1) Ukuran perusahaan:

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki akses ke sumber dana yang lebih banyak, sehingga cenderung mengambil lebih banyak hutang.

2) Risiko usaha:

Jika perusahaan memiliki risiko usaha yang tinggi, seperti dalam industri teknologi atau start-up, perusahaan mungkin lebih memilih untuk menggunakan lebih sedikit hutang untuk mengurangi risiko kebangkrutan

3) Tingkat suku bunga:

Tingkat suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman, sehingga perusahaan mungkin lebih memilih untuk menggunakan lebih sedikit hutang saat tingkat suku bunga tinggi.

4) Tingkat pajak:

Biaya bunga dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga perusahaan mungkin lebih cenderung untuk menggunakan hutang saat tingkat pajak yang tinggi.

5) Kebijakan dividen:

Jika perusahaan memiliki kebijakan dividen yang agresif, perusahaan mungkin akan menggunakan lebih sedikit hutang untuk meminimalkan risiko kebangkrutan dan memenuhi kebutuhan kas untuk membayar dividen.

6) Struktur industri:

Struktur industri juga dapat mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. Beberapa industri memiliki biaya modal yang lebih tinggi dan cenderung menggunakan lebih sedikit hutang, seperti industri utilitas, sementara industri yang lebih berisiko seperti industri teknologi dan farmasi cenderung menggunakan lebih sedikit hutang.

7) Keadaan pasar:

Kondisi pasar saat ini dapat mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. Jika pasar saham sedang baik, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk mengambil hutang dan mengeluarkan obligasi untuk membiayai proyek-proyek

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk membuat keputusan hutang yang tepat dan meminimalkan risiko keuangan

BAB 4

KAIDAH DAN PENGUKURAN RISET

Riset ini bertujuan untuk mengetahui struktur kepemilikan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang, serta untuk mengetahui strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk mencapai tujuan bisnis. Rancangan atau kaidah riset ini membahas tentang populasi sampel, Sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta defenisi operasional riset dan pengukurannya

Adapun yang menjadi populasi yaitu keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Perusahaan-perusahaan tersebut dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2017.
2. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember selama periode pengamatan penelitian, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2017.
3. Memiliki data mengenai struktur kepemilikan, dan kebijakan hutang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa angka-angka dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Berdasarkan sumber yang diperoleh, penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2010-2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang berisi pengungkapan mengenai struktur kepemilikan, dividen, kebijakan hutang, kualitas laba dan nilai

perusahaan. Dokumentasi laporan keuangan tersebut diperoleh dari www.idx.co.id.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dimana data dikumpulkan melalui pengamatan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-2017.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan melalui metode analisis jalur (*path analysis*). Pengertian analisis jalur dari Robert B. Rutherford (1993) menyatakan bahwa: "Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung."

Sementara itu, definisi dari Paul Webley (1997) menyatakan bahwa: "Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel."

Analisis jalur merupakan metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga variabel atau lebih. Metode ini mempunyai kelebihan dibandingkan regresi linear karena selain menemukan pengaruh langsung, model analisis jalur juga dapat menemukan pengaruh tidak langsung dalam hubungan antar variabel melalui variabel perantara (*intervening*), sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan detail. Istilah variabel bebas ataupun variabel terikat tidak digunakan dalam analisis jalur, dan sebagai gantinya istilah yang digunakan adalah variabel eksogenus dan variabel endogenus.

Definisi Operasional dan Pengukurannya

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah proyeksi dari insider ownership. Insider ownership adalah prosentase saham yang dimiliki oleh insider, seperti manajer atau direktur, besarnya adalah jumlah saham yang dimiliki insider per total saham beredar (Wardani dan Hermuningsih, 2011).

Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang sering dilambangkan dengan *debt to total asset ratio* (DAR) yang merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Kebijakan hutang adalah Jumlah kebijakan manajemen untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Indikatornya adalah Persentase perbandingan antara total hutang dengan ekuitas dari total saham yang beredar

BAB 5

STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG

A. Deskripsi Data

Data penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Sampel harus memenuhi kriteria yakni mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 2010-2017 dan tersedianya data kepemilikan Perusahaan, Dividen, Kebijakan hutang, Kualitas laba, dan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengumpulan data banyaknya perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah 14 perusahaan selama 8 tahun pengamatan sehingga besar sampel adalah 112 sampel.

**Tabel 1 Statistik Data Perusahaan
di BEI Tahun 2010-2017**

Variabel	rata-rata	SD	Minimum	maksimum	Jumlah	n
Kepemilikan Perusahaan	0.4892	0.2522	0.03391	0.9813315	54.79589	112
Kebijakan Hutang	0.3502	0.1615	0.08976	0.91187	39.219022	112

Sumber : data diolah, 2018

Dari Tabel 1 di atas diperoleh bahwa rata-rata kepemilikan perusahaan tahun 2010-2017 adalah sebesar 0,4892 dan standar deviasi 0.2522 dengan minimal diperoleh 0.0339 dan maksimal 0.981. Rata-rata kebijakan hutang yang diperoleh di perusahaan adalah sebesar 0.3502 dan standar deviasi sebesar 0.1615 dengan minimal 0.08976 dan maksim 0.91187.

B. Analisis Regresi Pada Persamaan Y

Uji regresi pada persamaan $Y = P_5 X_1 + P_7 Z_1 + P_8 Z_2 + P_6 X_2 + e_3$. Hal ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung variabel Struktur kepemilikan terhadap kebijakan hutang (Y)

Setelah melakukan uji regresi pada persamaan di atas diperoleh hasil statistik sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Estimasi Kepemilikan Perusahaan (X) terhadap Kebijakan Hutang (Y)

Model	Koefisien Jalur	t	p	R ²
X	0.652	18,698	0.000	
PYe3	0.3633			
Sig. F	0.000			

Dependen Variabel Y (kebijakan hutang)

Sumber: Data Diolah 2019

Secara langsung struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Besaran pengaruh langsung kepemilikan perusahaan terhadap kebijakan hutang adalah sebesar 0.652 atau 65.2%. Artinya, tinggi rendahnya kebijakan hutang hanya mampu dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaab sebesar 65.2% sedangkan sisanya 44.8% dipengaruhi faktor lain di luar model.

C. Struktur Kepemilikan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang

Hasil regresi menjelaskan bahwa kepemilikan perusahaan (X1) berpengaruh terhadap kebijakan hutang (Z1). Pengujian statistik pada tabel tersebut diperoleh koefisien jalur P1 sebesar 0.652 dan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hasil statistik ini menunjukkan bahwa

struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk menggunakan hutang untuk mendanai investasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa institusi keuangan biasanya lebih bersedia memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi karena memiliki struktur kepemilikan yang lebih stabil dan lebih banyak sumber daya finansial yang tersedia. Selain itu, pemilik institusional dapat memberikan jaminan atau dukungan finansial kepada perusahaan, yang juga dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk menggunakan hutang. Di sisi lain, kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menggunakan hutang. Ini karena pemilik manajerial cenderung memiliki kepentingan yang lebih besar dalam mempertahankan kontrol atas perusahaan dan lebih fokus pada keuntungan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, mereka mungkin lebih memilih untuk menggunakan modal sendiri daripada mengambil hutang. Secara keseluruhan, struktur kepemilikan perusahaan dapat berpengaruh pada kebijakan hutang. Namun, dampaknya dapat berbeda tergantung pada jenis kepemilikan dan preferensi pemilik

Hasil ini sejalan dengan penelitian Handayani (2016), yang menyatakan bahwa Kepemilikan Intitusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Hutang. Penelitian ini menemukan bahwa dengan peningkatan Kepemilikan Intitusional berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang perusahaan akan menurun.

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dari (Nasrizal et al, 2010) dan (Larasati, 2011) yang menyatakan Kepemilikan Intitusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Hutang. Hal ini berarti apabila semakin besar keterlibatan Kepemilikan Intitusional dalam pengawasan, maka penggunaan hutang akan semakin tinggi. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh Intitusional maka dapat memonitoring kerja Manajer.

Dengan keikutsertaan pemilik saham dalam pengawasan maka manager akan bekerja untuk kesejahteraan pemegang saham. Penggunaan hutang sebagai pembiayaan kegiatan perusahaan dapat memberikan keuntungan yang berasal dari pengurangan pajak karena adanya bunga yang dibayarkan akibat hutang akan mengurangi penghasilan yang terkena pajak

Hasil ini tidak sejalan dengan Moh. Syadeli, (2013) menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, yang berarti kepemilikan insitutional dalam penelitian ini tidak dapat menggantikan peranan hutang dalam memonitor manajemen perusahaan; profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang, yang berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil hutang yang digunakan dalam kegiatan pendanaan, karena perusahaan dapat menggunakan internal equity;

D. Keputusan dalam Mengelola Modal Sendiri atau Hutang

Keputusan untuk mengelola modal sendiri atau berhutang dalam berbisnis tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Tidak ada pilihan yang lebih baik secara umum, karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda

Secara umum, pengelolaan modal sendiri dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan, seperti:

1. Kontrol penuh atas operasi bisnis tanpa ketergantungan pada kreditur.
2. Tidak perlu membayar bunga dan cicilan utang secara teratur, sehingga dapat mengurangi beban keuangan
3. Menghindari risiko keuangan yang terkait dengan hutang

Namun, pengelolaan modal sendiri juga memiliki kelemahan, seperti

1. Keterbatasan sumber daya dan modal, yang dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan berkembang
2. Risiko investasi yang lebih tinggi, karena perusahaan harus

menanggung risiko keuntungan dan kerugian sendiri

Sementara itu, berhutang juga memiliki keuntungan dan kelemahan, keuntungannya seperti

1. Dapat membantu perusahaan memperoleh modal yang lebih besar dan membiayai kebutuhan bisnis jangka pendek
2. Meningkatkan leverage atau daya ungkit perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

Namun berhutang juga memiliki kelemahan, seperti

1. Memiliki risiko keuangan yang tinggi, karena perusahaan harus membayar bunga dan cicilan utang secara teratur, bahkan jika pendapatan perusahaan menurun
2. Menghasilkan biaya hutang yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti bunga dan biaya administrasi

Oleh karena itu, keputusan untuk mengelola modal sendiri atau berhutang harus dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan situasi dan kondisi perusahaan, tujuan jangka panjang perusahaan, kebutuhan bisnis jangka pendek, dan tingkat risiko yang dapat diterima.

BAB 6

STRATEGI MENGELOLA STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN HUTANG

A. Strategi Mengelola Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang

Strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang dapat bervariasi tergantung pada tujuan bisnis yang ingin dicapai. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Mengoptimalkan struktur modal:

Mengoptimalkan struktur modal perusahaan adalah suatu proses untuk mencapai struktur modal yang optimal, yaitu kombinasi antara modal sendiri dan hutang yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi biaya modal yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perusahaan dapat mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya modal, risiko keuangan, dan kemampuan untuk membayar utang di masa depan.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal perusahaan;

- a) Analisis biaya modal: Perusahaan harus melakukan analisis biaya modal untuk mengetahui biaya yang harus dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari modal sendiri dan hutang. Dengan melakukan analisis biaya modal, perusahaan dapat menentukan tingkat hutang yang optimal yang dapat menghasilkan biaya modal yang lebih rendah.

- b) Menjaga keseimbangan antara hutang dan modal sendiri: Perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hutang dan modal sendiri dalam struktur modal. Terlalu banyak mengandalkan hutang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, sementara terlalu banyak mengandalkan modal sendiri dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan berkembang
- c) Mencari sumber modal yang murah: Perusahaan dapat mencari sumber modal yang lebih murah, seperti pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah atau memperoleh modal melalui penerbitan saham baru. Dengan memperoleh modal dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi beban biaya modal.
- d) Menerapkan manajemen risiko: Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko untuk mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan hutang. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara mengelola hutang dengan benar, mengurangi risiko operasional, dan diversifikasi portofolio investasi.
- e) Memperhatikan kondisi pasar: Perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar, seperti suku bunga, tingkat inflasi, dan permintaan pasar. Dengan memperhatikan kondisi pasar, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memilih struktur modal yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

2. Meningkatkan likuiditas:

Likuiditas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, seperti membayar tagihan atau mengatasi kebutuhan tunai sehari-hari. Meningkatkan likuiditas sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis.

Perusahaan dapat menggunakan kebijakan hutang untuk meningkatkan likuiditas dan kecukupan modal kerja. Hal ini dapat

dicapai dengan meminimalkan pembayaran dividen dan meningkatkan pinjaman jangka pendek.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas

- a) Meningkatkan arus kas masuk: Perusahaan dapat meningkatkan arus kas masuk dengan meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya produksi.
- b) Memperpanjang waktu pembayaran kreditur: Perusahaan dapat memperpanjang waktu pembayaran kreditur dengan bernegosiasi untuk membayar tagihan dalam periode waktu yang lebih lama, yang dapat memberikan waktu tambahan bagi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk
- c) Mengelola persediaan: Perusahaan dapat mengelola persediaan dengan cara mengurangi persediaan yang tidak perlu dan memantau tingkat persediaan yang optimal agar tidak kehabisan persediaan yang dibutuhkan.
- d) Mempercepat periode penagihan: Perusahaan dapat mempercepat periode penagihan dengan mengirim faktur lebih awal atau memperpendek periode kredit yang ditawarkan kepada pelanggan.
- e) Mendapatkan pembiayaan: Perusahaan dapat mencari pembiayaan tambahan untuk meningkatkan likuiditas, seperti pinjaman jangka pendek atau garansi bank.

3. Meningkatkan pertumbuhan:

Pertumbuhan adalah salah satu tujuan utama bisnis yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan kebijakan hutang untuk membiayai ekspansi dan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan risiko keuangan yang dapat timbul. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, antara lain;

- a) Inovasi produk dan layanan: Dengan terus melakukan inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Inovasi dapat

memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membuka peluang bisnis baru.

- b) Ekspansi geografis: Perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan dengan mengekspansi ke wilayah baru, baik di dalam maupun luar negeri. Ekspansi ini dapat membuka pasar baru dan meningkatkan pemasukan perusahaan.
- c) Mergers dan akuisisi: Perusahaan dapat memperluas bisnis mereka dengan melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama atau berbeda. Dengan melakukan merger atau akuisisi, perusahaan dapat meningkatkan skala operasi mereka dan memperluas basis pelanggan.
- d) Peningkatan efisiensi: Perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan mereka dengan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, atau meningkatkan penggunaan teknologi.
- e) Pemasaran dan branding yang kuat: Dengan memiliki pemasaran dan branding yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek mereka dan menarik pelanggan baru. Hal ini dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan pemasukan perusahaan.
- f) Pendanaan yang tepat: Perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan mereka dengan mendapatkan pendanaan yang tepat, baik melalui sumber internal maupun eksternal. Pendanaan yang tepat dapat membantu perusahaan memperluas bisnis mereka, meningkatkan produksi, dan mengembangkan produk dan layanan baru.
- g) Fokus pada pelanggan: Fokus pada pelanggan adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

4. Mengendalikan kepemilikan:

Perusahaan dapat menggunakan struktur kepemilikan untuk mengendalikan manajemen dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan kepemilikan adalah

- a) Membuat perjanjian kepemilikan: Perjanjian kepemilikan harus dibuat untuk menentukan hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk di dalamnya aturan terkait pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
- b) Membuat sistem pengawasan: Sistem pengawasan harus dibuat untuk memastikan bahwa pemegang saham dan manajemen menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
- c) Menetapkan struktur kepemilikan yang tepat: Struktur kepemilikan yang tepat harus ditetapkan agar perusahaan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu perusahaan dalam memperoleh dana, memperluas bisnis, dan mengambil keputusan dengan lebih cepat.
- d) Memilih manajemen yang tepat: Pemegang saham harus memilih manajemen yang kompeten dan mempercayakan mereka untuk mengelola bisnis secara efektif.
- e) Menerapkan transparansi: Transparansi harus diterapkan dalam pengelolaan perusahaan agar pemegang saham dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dan memantau kinerja manajemen.
- f) Menghindari konflik kepentingan: Konflik kepentingan harus dihindari agar tidak mengganggu pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham

5. Meningkatkan efisiensi:

Meningkatkan efisiensi adalah salah satu faktor penting dalam mengelola sebuah perusahaan, yang dapat membantu meningkatkan keuntungan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan dapat menggunakan struktur kepemilikan untuk

meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko.

Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola perusahaan

- a) Menetapkan tujuan yang jelas: Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap departemen dan karyawan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Hal ini dapat membantu mengarahkan sumber daya dan energi pada hal-hal yang benar-benar penting untuk mencapai tujuan perusahaan
- b) Mengadopsi teknologi yang tepat: Mengadopsi teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi di banyak area, seperti proses produksi, manajemen inventaris, dan pelayanan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, proses bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien.
- c) Meningkatkan kualitas SDM: Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam perusahaan dapat membantu meningkatkan efisiensi karena karyawan yang berkualitas dapat menjalankan tugas-tugas dengan lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, karyawan yang berkualitas juga dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
- d) Menerapkan sistem manajemen yang efektif: Menerapkan sistem manajemen yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam mengelola perusahaan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan sistem manajemen kualitas, manajemen risiko, atau sistem manajemen lainnya yang dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis.
- e) Mengukur kinerja secara teratur: Mengukur kinerja perusahaan secara teratur dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengukur kinerja secara teratur, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif

Namun, penting untuk diingat bahwa strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang harus selalu mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

B. Manfaat Struktur Kepemilikan dalam Mencapai Tujuan Bisnis .

Struktur kepemilikan adalah cara di mana sebuah perusahaan dimiliki dan dikendalikan, baik secara pribadi, kelompok, atau publik. Struktur kepemilikan yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, antara lain

1. Meningkatkan akses ke sumber daya:

Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengakses sumber daya tambahan, seperti modal, teknologi, dan keterampilan manajerial dari pemilik atau investor.

Dalam hal struktur kepemilikan, perusahaan dapat menarik investor baru atau mitra bisnis melalui penawaran saham atau pembiayaan bersama. Dengan menambah pemilik saham baru atau mitra bisnis, perusahaan dapat meningkatkan akses ke sumber daya dan jaringan bisnis yang lebih luas. Selain itu, struktur kepemilikan yang baik dapat memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor dan mitra bisnis untuk berinvestasi dalam bisnis perusahaan.

Sementara itu, kebijakan hutang dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan akses ke sumber daya keuangan bagi perusahaan. Dalam kebijakan hutang, perusahaan dapat mengambil pinjaman dari bank atau investor dengan jaminan atas aset perusahaan atau obligasi perusahaan. Namun, perusahaan perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan hutang, karena terlalu banyak hutang dapat membebani perusahaan dengan bunga dan mengurangi keuntungan bersih.

Dalam mengoptimalkan akses ke sumber daya, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko, keuntungan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, strategi

perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan akses ke sumber daya dengan cara yang tepat dan menghindari risiko yang tidak perlu.

2. Mengurangi risiko:

Dengan memiliki banyak pemilik, risiko bisnis dapat dibagi dan berkurang. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang baik juga dapat mengambil keuntungan dari saran dan pengetahuan yang diberikan oleh pemilik atau investor.

Mengurangi risiko merupakan salah satu hal yang penting dalam mengelola sebuah bisnis. Risiko dapat datang dari berbagai sumber seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, kegagalan produk atau layanan, dan kegagalan manajemen. Namun, dengan mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang dengan baik, perusahaan dapat mengurangi risiko dan menjaga keberlangsungan bisnis jangka panjang

Dalam hal struktur kepemilikan, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan membagi kepemilikan saham ke dalam beberapa pemegang saham atau dengan mencari investor yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bisnis yang sama. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kehilangan kendali atas bisnis dan meningkatkan peluang untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, perusahaan juga dapat mengurangi risiko dengan membuat perencanaan bisnis yang baik dan mempertimbangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempersiapkan diri dengan cara yang tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan jika risiko tersebut terjadi.

Dalam mengurangi risiko, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti keuangan, operasional, dan reputasi. Oleh karena itu, strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang harus mencakup semua aspek bisnis dan dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa

risiko dapat diminimalkan dan bisnis dapat berjalan dengan lancar.

3. Memperluas jangkauan pasar:

Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang baik dapat memperluas jangkauan pasar mereka melalui kemitraan dan aliansi strategis dengan perusahaan lain yang dimiliki oleh pemilik yang sama atau investor yang sama

Memperluas jangkauan pasar merupakan hal penting dalam mencapai tujuan bisnis, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini, struktur kepemilikan dan kebijakan hutang dapat memainkan peran penting dalam membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar.

Dalam hal struktur kepemilikan, perusahaan dapat mencari investor yang memiliki jaringan luas dan pengalaman dalam industri tertentu. Dengan cara ini, perusahaan dapat memanfaatkan jaringan investor untuk membantu memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada klien potensial baru di pasar yang belum dijelajahi sebelumnya.

Perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan lain yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas atau dengan pemain utama di pasar yang diinginkan. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperhatikan struktur kepemilikan dan kebijakan hutang dari perusahaan target untuk memastikan bahwa akuisisi atau merger tersebut dapat dilakukan dengan aman dan sukses.

Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengembangkan platform e-commerce atau meningkatkan kehadiran online mereka untuk mencapai konsumen yang lebih luas

Dalam memperluas jangkauan pasar, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi yang tepat dan memperhatikan berbagai faktor seperti potensi pasar, biaya, dan risiko. Oleh karena itu, strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan

hutang harus dijalankan dengan cermat untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar dengan aman dan berhasil

4. Meningkatkan efisiensi operasional:

Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pemilik atau investor dapat membantu dengan memberikan sumber daya dan pengalaman manajemen yang diperlukan.

Meningkatkan efisiensi operasional merupakan salah satu tujuan penting bagi perusahaan dalam mencapai keuntungan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Efisiensi operasional dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, termasuk melalui struktur kepemilikan dan kebijakan hutang.

Dalam hal struktur kepemilikan, perusahaan dapat mencari investor yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam industri tertentu untuk membantu meningkatkan efisiensi operasional. Investor dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan saran yang berguna dalam meningkatkan proses operasional dan pengelolaan biaya.

Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi atau perangkat lunak baru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, implementasi sistem manajemen rantai pasokan (supply chain management) yang canggih atau menggunakan robotika dalam produksi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional,

Perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengembangkan kebijakan internal yang lebih efektif dan mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing dalam beberapa area non-inti bisnis. Memperbarui proses bisnis dan meningkatkan penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi waktu dan biaya produksi, mempercepat waktu penyelesaian produk, dan meningkatkan kualitas produk

Dalam mengoptimalkan efisiensi operasional, perusahaan

harus memperhatikan bahwa investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan potensi keuntungan jangka panjang dan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi strategi mereka dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk memastikan bahwa mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan cara yang tepat dan efektif

5. Menarik bakat dan keterampilan:

Menarik bakat dan keterampilan merupakan salah satu tujuan penting bagi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk mencapai tujuan bisnis. Perusahaan yang dapat menarik bakat dan keterampilan terbaik dapat memiliki keunggulan dalam industri mereka, memperkuat reputasi merek, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang baik dapat menarik bakat dan keterampilan yang lebih baik dalam hal manajemen dan keuangan

Dalam hal struktur kepemilikan, perusahaan dapat menarik investor yang memiliki jaringan luas dan reputasi yang baik di industri tertentu. Investor seperti ini dapat membantu perusahaan dalam menarik bakat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Investor juga dapat memberikan saran dan dukungan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Perusahaan juga dapat menarik bakat dan keterampilan terbaik dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang di dalam perusahaan. Ini dapat mencakup program pelatihan dan pengembangan, kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek yang menantang, dan kesempatan untuk bekerja dengan para ahli di industri tertentu.

Perusahaan juga dapat menarik bakat dan keterampilan dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif dan paket tunjangan yang menarik. Ini dapat mencakup bonus kinerja, saham, asuransi kesehatan, dan program pensiun.

Dalam rangka menarik bakat dan keterampilan terbaik,

perusahaan perlu memperhatikan citra merek dan reputasi mereka di mata masyarakat. Perusahaan yang memiliki reputasi baik dapat menarik karyawan yang berkualitas tinggi dan mengurangi biaya untuk merekrut dan mempertahankan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kebijakan mereka dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk memastikan bahwa mereka dapat menarik bakat dan keterampilan terbaik untuk mencapai tujuan bisnis mereka.

6. Memperkuat citra merek:

Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang baik dapat memperkuat citra merek mereka. Pemilik atau investor yang memiliki reputasi yang baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan citra mereka di mata pelanggan dan kreditor.

Memperkuat citra merek dapat menjadi manfaat lain dari struktur kepemilikan yang tepat dalam mencapai tujuan bisnis. Dalam banyak kasus, kepemilikan yang stabil dan terkonsolidasi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebuah struktur kepemilikan yang kuat dan stabil dapat membantu membangun citra merek yang positif dan memperkuat kredibilitas bisnis Anda. Misalnya, jika perusahaan Anda dimiliki oleh keluarga yang telah berbisnis selama beberapa generasi, ini dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa produk atau layanan Anda memiliki kualitas yang konsisten dan dapat diandalkan.

Di sisi lain, jika perusahaan Anda sering berubah kepemilikan atau mengalami instabilitas dalam kepemilikan, hal ini dapat mempengaruhi citra merek dan reputasi bisnis Anda. Oleh karena itu, membangun struktur kepemilikan yang stabil dan terkonsolidasi dapat membantu memperkuat citra merek dan reputasi bisnis Anda, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan dan daya tarik merek.

7. Meningkatkan nilai perusahaan:

Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Pemilik atau investor yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dapat membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan akhir dari setiap bisnis. Struktur kepemilikan yang tepat dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Dalam banyak kasus, kepemilikan yang terkonsolidasi dan stabil dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan jangka panjang yang lebih baik dan mengambil risiko yang lebih besar dalam rangka mencapai tujuan bisnis jangka panjang.

Dalam membangun struktur kepemilikan dan kebijakan hutang yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti kondisi pasar, risiko bisnis, dan tujuan jangka panjang. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat menciptakan struktur kepemilikan dan kebijakan hutang yang dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

Dalam rangka mencapai tujuan bisnis, perusahaan harus memiliki struktur kepemilikan yang baik. Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengakses sumber daya tambahan, memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan efisiensi operasional, menarik bakat dan keterampilan, memperkuat citra merek, dan meningkatkan nilai perusahaan

BAB 7

HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN HUTANG DALAM MENCAPAI TUJUAN BISNIS

Hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan hutang sangat erat terkait dalam mencapai tujuan bisnis. Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu perusahaan mempertahankan kontrol dan meningkatkan efisiensi operasional, sementara kebijakan hutang yang tepat dapat membantu perusahaan memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan dan ekspansi bisnis

Pemilihan struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. Misalnya, perusahaan yang dimiliki secara keluarga cenderung mengambil keputusan kebijakan hutang yang lebih konservatif, karena mereka lebih memperhatikan risiko dan mempertahankan kepemilikan dalam jangka panjang. Sedangkan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional cenderung mengambil keputusan kebijakan hutang yang lebih agresif, karena mereka lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dan memperhatikan pengembalian investasi

Di sisi lain, kebijakan hutang juga dapat mempengaruhi struktur kepemilikan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan mengambil hutang untuk membiayai akuisisi atau ekspansi bisnis, maka perusahaan mungkin perlu mengeluarkan saham baru untuk mengurangi beban hutang dan menjaga rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Hal ini dapat berdampak pada perubahan struktur kepemilikan perusahaan, di mana investor baru dapat masuk dan memperoleh saham perusahaan

Dalam hal ini, struktur kepemilikan yang stabil dan terkendali

dapat membantu perusahaan mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang, dan menghindari campur tangan yang tidak diinginkan dari pihak luar yang dapat memengaruhi keputusan bisnis. Di sisi lain, kebijakan hutang yang cerdas dan bijaksana dapat membantu perusahaan memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan bisnis dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham

Namun demikian, terdapat juga risiko dan tantangan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang. Salah satu risiko terbesar adalah kelebihan hutang yang dapat membebani perusahaan dengan biaya bunga yang tinggi dan mengancam stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dengan cermat struktur kepemilikan dan kebijakan hutang yang sesuai dengan kondisi dan tujuan bisnis jangka panjang, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan efisien

Dalam kesimpulannya, struktur kepemilikan dan kebijakan hutang yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis jangka panjang dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan cara yang tepat

Secara parsial, terdapat pengaruh langsung kepemilikan perusahaan terhadap kebijakan hutang adalah sebesar 0.652 atau 65.2%. Artinya, tinggi rendahnya kebijakan hutang hanya mampu dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaan sebesar 65.2%.

Strategi perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang untuk mencapai tujuan bisnis yaitu antara lain Mengoptimalkan struktur modal, Meningkatkan likuiditas, Meningkatkan pertumbuhan, dan Mengendalikan kepemilikan.

Dalam mengelola struktur kepemilikan dan kebijakan hutang, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti risiko, biaya modal, dan tujuan bisnis jangka panjang. Mengoptimalkan struktur modal perusahaan dan menetapkan kebijakan hutang yang

tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif.

Selain itu, mempertahankan kontrol dan mengendalikan kepemilikan perusahaan juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak kehilangan arah atau terpengaruh oleh kepentingan pihak luar.

Meningkatkan likuiditas dan efisiensi juga merupakan hal penting dalam mengelola perusahaan, yang dapat membantu meningkatkan keuntungan dan daya saing perusahaan di pasar.

Dalam rangka mencapai tujuan bisnis, perusahaan juga harus mengadopsi teknologi yang tepat dan meningkatkan kualitas SDM. Dengan mengambil tindakan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan bisnis melalui struktur kepemilikan dan kebijakan hutang yaitu Perusahaan harus melakukan analisis risiko secara cermat sebelum menetapkan struktur modal dan kebijakan hutang. Analisis ini harus mempertimbangkan berbagai risiko seperti risiko keuangan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi.

Perusahaan harus mempertahankan kontrol kepemilikan agar tidak kehilangan arah atau terpengaruh oleh kepentingan pihak luar. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertahankan saham mayoritas atau dengan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak luar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faizal. (2004). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Pertama, Cetakan ketiga. Malang: UMN Press
- Adipratama, Randi, and Endang Tri WIDYARTI. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public Non Bank yang terdaftar di BEI, periode 2001-2008)*. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Agus Harjito dan Martono. (2014). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonosia.
- Bhakti, A. D. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2)*, 1-20.
- Handayani, N. L. R. (2016). Pengaruh Stuktur Kepemilikan Institusional Dan Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Hutang Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA, 3(1)*, 1-11.
- Halomoan, Gina, dan Chaerul D. Djakman. (2004). Pengujian Pecking Order Hypothesis pada Emiten di Bursa Efek Jakarta Tahun 1994 dan 1995, Simposium Nasional Akuntansi
- Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Indahningrum, Rizka dan Ratih. (2009). Pengaruh Kepemilikan

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dividen, Pertumbuhan perusahaan, Free Cash Flow, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 11, No.3 ; 189-207)

Jayne Godfrey, et. Al. (2010). *Accounting Theory*. Australia : John Wiley and Sons.

Jensen, M. C., & Smith Jr, C. W. 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance*, McGraw-Hill. *Inc., USA*.

Jensen, M.C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, V. 3, No. 4, pp. 305-360

Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kurniasih, Wida. (2015). *Pengertian Internship: Tujuan, Manfaat, dan Aturannya*.

https://www.gramedia.com/literasi/internship/#Pengertian_Internship

Larasati, Eva. (2011). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Juli 2011; hlm 103 – 107).

Nasrizal, Kamaliah, dan Tika Rammi Syafitri. (2010). Analisis Pengaruh Free Cash Flow Kebijakan Deviden, Kepemilikan Saham Manajerial, dan Kepemilikan Saham Intitusional terhadap Kebijakan Hutang. Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Pasaribu, M.Y., Topowijono., dan Sulasmiyati, Sri. (2016). "Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 35, No. 1, Juni, hal. 154-164.

Pracihara, Sonya Majid. (2016). "Pengaruh kebijakan hutang, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan (studi pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014)." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 4.2 (2016): 1-10.

Schroeder. (2003). *Operations Management: Contemporary Concepts and Cases*. Edisi 2. Singapore, McGraw-Hill

Sudana, I. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga

Syadeli, M. (2013). Struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan pemanufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2).

Petta, B. C., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). *Business Accounting Review*, 5(2), 625–634

Rika. Nurela dan Islahudin. (2008). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan: dengan Persentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi*

- Singal, P. A., & Putra, I. N. W. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. E-Jurnal Akuntansi, 298(1), 468–484.
- Wahidahwati. (2002). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Keagenan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.5 . No.1; 1-16)
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility , Leverage , Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. Widyakala, 6(1), 55–776.
- Yeniatie dan Nicken. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di BEI. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12 No. 1; 1-16)

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Rustan,SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perpajakan (D3) Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu beliau berprofesi juga sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rustan. Beliau Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Jurusan Akuntansi, S1 di Universitas Hasanuddin Jurusan

Magister Akuntansi

dan S3 di Universitas MuslimIndonesia (UMI) jurusan Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan. Saat ini aktif melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun bidang ilmu keahlian yaitu Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Auditing, dan Manajemen Keuangan.

Buku- Edisi 2023

**Rustan- Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang
(Strategi Perusahaan dalam Mengelola Struktur Kepemilikan dan
Kebijakan Hutang Untuk Mencapai Tujuan Bisnis)**



Buku tentang Struktur kepemilikan dan Kebijakan Hutang dapat memberikan manfaat yaitu memberikan wawasan tentang faktor-faktor eksternal dan internal. buku ini memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana struktur kepemilikan perusahaan dapat memengaruhi kebijakan hutang dan bagaimana perusahaan dapat memilih kebijakan hutang yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan mereka

Dr. Rustan,SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu beliau berprofesi juga sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rustan. Beliau Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Jurusan Akuntansi, S1 di Universitas Hasanuddin Jurusan Magister Akuntansi dan S3 di Universitas MuslimIndonesia (UMI) jurusan Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan